

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. DESKRIPSI TEORITIS

1. Tinjauan Tentang Pendidikan Lalu Lintas

a. Pengertian Pendidikan Lalu Lintas

Pendidikan merupakan usaha membina kepribadian dan kemajuan manusia baik fisik maupun moril, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia yang lebih bermanfaat dan berkualitas. Melalui pendidikan maka suatu bangsa dapat berdiri kokoh di tengah-tengah globalisasi dunia. Dalam pasal 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun. 2003) dijelaskan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Lalu Lintas didefinisikan sebagai gerak krendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi pergerakan kita dari suatu tempat ketempat tujuan

dengan menggunakan alat transportasi melalui ruang jalan bisa dikatakan sebagai lalu lintas.

Lalu lintas dilihat dalam konteks pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkan kesadaran tertib lalu lintas, sehingga peserta didik mampu mengendalikan atau mengurangi timbulnya kecelakaan lalu lintas. Upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang mengembangkan sikap dan etika berlalu lintas, yang santun, aman, nyaman, tertib, dan selamat, baik dari dirinya maupun orang lain.

Pendidikan lalu lintas dalam konteks pendidikan berarti melakukan serangkaian usaha secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib lalu lintas. Pendidikan lalu lintas memfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang cara berlalu lintas, dan menanamkan nilai-nilai etika budaya tertib lalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda. Pendidikan Lalu Lintas memfokuskan pada penanaman pengetahuan tentang tata cara berlalu lintas (*transfer of knowledge*) dan menanamkan nilai-nilai (*transform of values*) etika dan budaya tertib berlalu lintas dan membangun perilaku pada generasi muda.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan lalu lintas dapat diartikan melakukan serangkaian usaha

secara terprogram dan tersistem untuk melahirkan generasi yang memiliki etika dan budaya tertib berlalu lintas.

b. Peraturan Lalu Lintas

Henry Hanzlitt (2003: 93) mengemukakan “Peraturan lalu lintas tidak ada dalam rangka mengurangi atau memperlambat lalu lintas, melainkan untuk mempercepat dan memaksimumkannya demi keluasan yang terbesar yang konsisten dengan keselamatan timbal balik”. Dalam penegakkan peraturan lalu lintas, seperti dalam banyak bidang hukum dan moral yang lebih luas, kita tidak dapat memperoleh hak pertimbangan pribadi.

Peraturan lalu lintas merupakan sistem hukum dan sistem moral dalam mikrokosmos. Tujuannya yang khas adalah untuk memaksimalkan lalu lintas dan memaksimalkan keselamatan, untuk memungkinkan masing-masing orang mencapai tujuannya dengan sedikit campur tangan dari orang lain.

c. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas

Dalam Edukasi Kompasina (2014: 2) Pendidikan Lalu Lintas di sekolah memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Agar generasi muda secara sadar mampu mengimplementasikan sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, santun, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari;
2. Mengubah perilaku pemakai jalan (*road user behavior*);
3. Menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
4. Memberikan informasi tentang lalu lintas.

d. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas Kedalam Mata Pelajaran Pkn

Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris “*integrate*” yang berarti menggabungkan, menyatukan, dan “*integration*” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Menurut Winarno (2013: 23) Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu :

1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu, dan
2. Membuat sesuatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Merujuk pada pengertian kedua pengintegrasian berarti penyatuan unsur-unsur yang ada.

Winarno (2013: 23) mengungkapkan “berintegrasi artinya berpadu (bergabung agar menjadi kesatuan yang utuh). Kata “mengintegrasikan “ berarti membuat untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi adalah menggabungkan atau menyatukan dua unsur atau lebih yang awalnya berbeda dan pada akhirnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan pengintegrasian memiliki arti penggabungan, dalam hal ini penggabungan materi pendidikan lalu lintas kedalam materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Kepolisian RI telah mengambil langkah positif dalam melakukan pengintegrasian pendidikan lalu lintas yaitu dengan mengadakan kerjasama (MoU) dengan Kemendiknas pada Tanggal 8 Maret 2010 dengan SK Mou N0. 03/III/KB/2010 tentang pendidikan berlalu lintas dalam pendidikan nasional.

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran Pkn dapat diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan materi pendidikan lalu lintas kedalam materi Pkn melalui telaah Standar Kompetensi dan Standar Isi.

Pengintegrasian pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran Pkn diharapkan berdampak positif bagi kesadaran dan perilaku anak didik dalam berlalu lintas. Setelah ada pendidikan lalu lintas, para siswa diharapkan mampu mengimplementasikan etika dan budaya berlalu lintas yang santun, tertib dan aman. Kunarto (1997: 3) mengemukakan bahwa “Etika berlalu lintas yaitu pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam berlalu lintas”.

Djoko Susilo (2007) dalam model pengintegrasian PLL (2010: 3) mengemukakan bahwa Beberapa program yang sudah di rancang untuk meningkatkan disiplin dan etika berlalu lintas siswa antara lain kegiatan intrakulikuler maupun ekstrakulikuler. Dalam kegiatan intrakulikuler pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui penyusunan Rencana Program Pembelajaran dengan menyisipkan materi pendidikan lalu lintas, sedangkan dalam kegiatan ekstrakulikuler dapat dilakukan melalui kegiatan PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Polsana (Polisi Sahabat Anak), dan Saka Bhayangkara Lantas.

e. Keterkaitan PKn Dengan Pendidikan Lalu Lintas

1. Aspek Konsep

PKn merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan Warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang dalam mengembangkan sikap dan etika berlalu lintas yang sopan, aman, nyaman, tertib dan selamat, baik bagi dirinya maupun orang lain, keduanya memfokuskan pada pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai sistem nilai yang diterima oleh masyarakat Indonesia.

2. Aspek Tujuan

Tujuan PKn di sekolah adalah antara lain berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk anti korupsi agar generasi muda secara sadar mampu membangun sistem nilai yaitu etika dan budaya berlalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi PKn erat hubungannya dengan Pendidikan LaluLintas.

3. Aspek Karakteristik

Karakteristik PKn adalah pembelajaran pengetahuan, karakter/ sikap dan keterampilan kewarganegaraan. Ketiga hal tersebut merupakan bekal bagi siswa untuk meningkatkan kecerdasan multidimensional yang memadai untuk menjadi Warga Negara yang baik.

Karakteristik kewarganegaraan adalah karakter warga negara yang memahami akan hak dan kewajibannya. Pendidikan Lalu Lintas membina karakter bangsa melalui nilai- nilai, etika dan budaya tertib lalu lintas. Dengan demikian PKn dan Pendidikan Lalu Lintas memiliki karakteristik yang sama.

4. Aspek Sasaran

PKn mengarah kepada terbentuknya manusia yang cerdas, trampil, kreatif, mentaati peraturan yang berlaku, berpartisipasi secara aktif, bertanggung jawab, berpikir kritis, logis, inovatif dan mampu memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai Warga Negara yang memahami hak dan kewajibannya, dan pada akhirnya menjadi Warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan Lalu Lintas mendorong orang untuk menunjukkan sikap, etika dan budaya tertib dalam berlalu

lintas. Orang yang menunjukkan sikap, etika dan budaya tertib berlalu lintas, dilandasi oleh kesadaran menaati peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan aspek sasaran, baik Pendidikan Lalu Lintas maupun PKn sangat terkait erat.

f. Langkah- Langkah Integrasi Pendidikan Lalu Lintas Melalui PKn

Telaah Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dimungkinkan untuk disisipkan aspek dan materi Pendidikan Lalu Lintas. Dari hasil telaah SK/KD kemudian disusunlah Model Integrasi Pendidikan Lalu Lintas kedalam materi PKn dari SK/KD tersebut.

Kemudian disusunlah Silabus PKn SD/MI, SMP/ MTS, SMA/MA/SMK yang bercirikan Integrasi Pendidikan Lalu Lintas. Langkah akhir adalah penyusunan RPP yang terintegrasi Pendidikan Lalu Lintas, implementasi proses pembelajaran Pendidikan Lalu Lintas mengacu pada RPP yang sudah terintegrasi oleh materi Pendidikan Lalu lintas.

2. Tinjauan Tentang Perilaku Tertib Berlalu Lintas

a. Pengertian Perilaku

Menurut Bandura dalam Walgito Bimo (2010: 12) mengemukakan antara perilaku, lingkungan dan organisme atau person itu sebenarnya satu dengan yang lain saling pengaruh mempengaruhi.

Sedangkan Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 41) mengemukakan bahwa “perilaku atau kegiatan individu menyangkut hal-hal yang dia sadari atau tidak disadari”. Tokoh lain Farozin (2004: 15) mengemukakan bahwa “Perilaku yang muncul dari individu dapat dikatakan merupakan usaha individu untuk memenuhi kebutuhannya dan usaha tersebut dapat diamati”.

Berdasarkan uraian dan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan yang saling mempengaruhi baik secara sadar ataupun tidak sadar.

b. Jenis Perilaku

Bimo Walgito (2010: 12) mengemukakan bahwa “perilaku manusia dapat dibedakan antara perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif”.

1. Perilaku refleksif

Perilaku refleksif merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai individu tersebut. Perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi dengan sendirinya secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran dan pengendali dari perilaku manusia. Perilaku refleksif pada dasarnya tidak dapat dikendalikan

karena merupakan perilaku yang alami, bukan perilaku yang dibentuk.

2. Perilaku non-refleksif

Perilaku non-refleksif merupakan perilaku yang dapat dibentuk dan dikendalikan karena dapat berubah dari waktu ke waktu sebagai hasil proses belajar. Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh reseptor kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui afektor.

c. Pembentukan Perilaku

1. Pembentukan perilaku dengan kebiasaan (*conditioning*)

Salah satu cara pembentukan perilaku dapat ditempuh dengan kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah perilaku tersebut. Teori ini dikemukakan oleh Skinner. Misalnya dalam berlalu lintas siswa dibiasakan untuk mendahului dari sebelah kanan dan lebih mengutamakan para pejalan kaki.

2. Pembentukan perilaku dengan pengertian (*insight*)

Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar dengan disertai adanya pengertian. Misalnya ketika mengendarai motor harus memakai helm, karena helm berfungsi untuk keamanan diri. Selain itu, bagi pengendara

sepeda motor tidak boleh membawa penumpang lebih dari satu orang, karena sangat membahayakan diri

3. Pembentukan perilaku dengan menggunakan model

Cara ini didasarkan dengan pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau contoh.

d. Teori perilaku

Bimo Walgito (2010: 15) mengemukakan bahwa “perilaku manusia tidak dapat dilepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan dimana individu itu berada. Perilaku itu didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa teori perilaku sebagai berikut:

1. Teori Insting

Menurut Mc Dougall perilaku itu disebabkan karena insting. Insting merupakan perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman.

2. Teori Dorongan

Teori ini bertitik belakang pada pandangan bahwa individu itu mempunyai dorongan-dorongan tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan individu yang mendorong individu berperilaku.

3. Teori insentif

Teori ini bertitik belakang pada pendapat bahwa perilaku individu itu disebabkan adanya insentif. Dengan insentif akan mendorong individu berbuat atau berperilaku. Insentif juga disebut sebagai *reinforcement* ada yang positif dan ada yang negatif. *Reinforcement* yang positif berkaitan dengan hadiah yang mendorong individu berbuat, sedangkan *reinforcement* negatif berkaitan dengan hukuman dan akan dapat menghambat dalam individu berperilaku.

4. Teori atribusi

Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku orang apakah perilaku itu disebabkan oleh keadaan internal ataukah oleh eksternal. Keadaan internal contohnya seperti motif dan sikap, sedangkan keadaan eksternal contohnya seperti lingkungan sosial.

e. Pengertian Tertib Berlalu Lintas

Pengertian tata tertib dan lalu lintas dapat di simpulkan bahwa tata tertib berlalu lintas adalah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat berkendara atau mengemudikan kendaraan, karena peraturan terdapat sanksi bagi seseorang yang melanggarnya.

Tertib berlalu lintas sangat penting bagi pengendara kendaraan roda dua, karena tertib berlalu lintas mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya. Pada saat seseorang tertib dalam berlalu lintas maka sebenarnya iya menjaga keselamatan diri sendiri. Yang termasuk dalam tertib berlalu lintas adalah:

- a. Menggunakan helm standar SNI,
- b. Melengkapi diri dengan SIM,
- c. Menggunakan dua spion,
- d. Menyalakan lampu sein pada saat akan berbelok,
- e. Tidak memainkan ponsel saat berkendara,
- f. Menaati rambu-rambu lalu lintas.

f. Perilaku Tertib Berlalu Lintas

Hukum dibuat untuk dipatuhi, kepatuhan terhadap hukum mengakibatkan terjadinya ketertiban dalam masyarakat dan sebaliknya ketidakpatuhan terhadap hukum akan mengakibatkan kekacauan.

Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dengan perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, tingkat kepatuhan terhadap hukum secara langsung menunjukkan kesadaran hukum. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk:

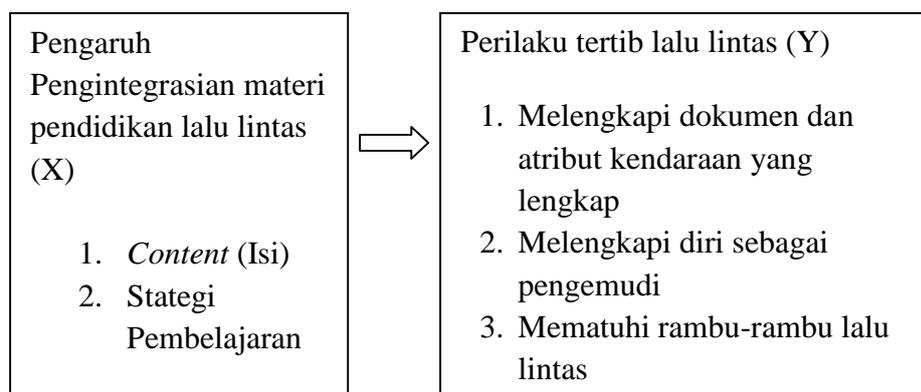
1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mempertahankan tertib hukum yang ada.
3. Menegakkan kepastian hukum.

B. KERANGKA PIKIR

Pendidikan lalu lintas merupakan pendidikan yang melibatkan aspek disiplin yang merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya dan tanggung jawab yaitu kesadaran manusia atau tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun tidak di sengaja.

Pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkaitan dengan pembentukan perilaku siswa, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Pendidikan lalu lintas mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan seseorang dalam perilaku tertib dalam berlalu lintas . Oleh karena itu menjadi tantangan dunia pendidikan untuk mengintegrasikan pendidikan lalu lintas kedalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, agar mampu menyiapkan SDM yang berperilaku tertib dalam berlalu lintas.

Dari uraian diatas, maka kerangka pikir adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

C. HIPOTESIS

Berdasarkan teori dan kerangka pikir di atas, maka dalam penelitian ini hipotesis penelitian ditetapkan sebagai berikut :

H₁ : Ada pengaruh pengintegrasian pendidikan lalu lintas terhadap perilaku tertib berlalu lintas siswa kelas XI MA Mamba'ul Huda.

H₀ : Tidak ada pengaruh pengintegrasian pendidikan lalu lintas terhadap perilaku tertib berlalu lintas siswa kelas XI MA Mamba'ul Huda.